

# Analisis Kegagalan Pasangan Calon Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid pada Pilgub Maluku 2024

Ferdi Rama Septiadi <sup>1\*</sup>, Idlan Dziqri Mahmudi <sup>2</sup>, Muamar Safrit Rachdical <sup>3</sup>, Algooth Putranto <sup>4</sup>

<sup>1\*,2,3,4</sup> Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Bakrie, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia.

Email: ferdiseptiadi10@gmail.com <sup>1\*</sup>, radikal.marsaoly@gmail.com <sup>2</sup>, idlandziqri19@gmail.com <sup>3</sup>, algoothp@gmail.com <sup>4</sup>

## Histori Artikel:

*Dikirim* 10 Desember 2024; *Diterima dalam bentuk revisi* 20 Desember 2024; *Diterima* 5 Januari 2025; *Diterbitkan* 10 Januari 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STMIK Indonesia Banda Aceh.

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan pasangan calon Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid pada Pemilihan Gubernur Maluku Utara (Pilgub Maluku) 2024. Pilkada ini memiliki arti penting dalam dinamika politik regional, karena melibatkan sejumlah figur strategis dan memengaruhi arah kebijakan daerah di masa depan. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya memahami faktor-faktor utama yang menyebabkan kekalahan pasangan calon, yang dapat mencakup aspek sosial, politik, dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengacu pada data dari dokumen resmi, laporan media, serta hasil penelitian yang relevan. Analisis menunjukkan bahwa pasangan calon ini menghadapi tantangan signifikan terkait konsolidasi internal tim pemenangan yang kurang solid, pendekatan komunikasi politik yang tidak sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta lemahnya jaringan politik dibandingkan kompetitor mereka. Faktor eksternal seperti dominasi kompetitor dengan basis dukungan yang lebih luas dan kemampuan mobilisasi yang lebih efektif turut menjadi penyebab kekalahan. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa pasangan Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid belum mampu memaksimalkan potensi modal sosial dan politik yang dimiliki untuk bersaing secara efektif. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis bagi kajian strategi politik dalam Pilkada, khususnya di wilayah Maluku Utara, serta memberi wawasan praktis bagi kandidat dalam persiapan strategi politik di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Kampanye Politik; Kekalahan Kandidat; Pilkada; Strategi Politik; Wilayah Maluku Utara.

## Abstract

This study aims to analyze the failure of the candidate pair Husain Alting Sjah and Asrul Rasyid in the 2024 Maluku Utara Gubernatorial Election (Pilgub Maluku). This election is crucial for regional political dynamics as it involves strategic figures and influences future policy directions. The research background focuses on understanding the main factors that contributed to the defeat, which may include social, political, and economic aspects. The study employed a literature review method, utilizing data from official documents, media reports, and relevant research findings. The analysis reveals that the candidates faced significant challenges, including insufficient internal consolidation within the campaign team, political communication strategies that failed to reach all societal layers effectively, and weaker political networks compared to their competitors. External factors, such as the dominance of rivals with broader support bases and more effective mobilization capabilities, also contributed to the loss. The study concludes that Husain Alting Sjah and Asrul Rasyid were unable to fully capitalize on their social and political assets to compete effectively. This research provides theoretical contributions to the study of political strategies in local elections, particularly in the Maluku Utara region, and offers practical insights for candidates in preparing political strategies in the future.

**Keyword:** Candidate Defeat; Election; Political Campaign; Political Strategy; Region of Maluku Utara.

## 1. Pendahuluan

Pemilihan Gubernur Maluku Utara (Pilgub Malut) 2024 menarik perhatian penting dalam politik daerah Indonesia. Kompetisi ini bukan hanya sekadar menentukan arah kepemimpinan provinsi, tetapi juga mencerminkan dinamika politik regional yang semakin kompleks. Dalam ranah demokrasi lokal, Pilgub sering kali menjadi ajang untuk menguji berbagai strategi politik yang digunakan oleh para calon, termasuk penerapan koalisi pragmatis, mobilisasi suara berbasis identitas, dan upaya pencitraan publik (Ekowati, 2019; Fadhli *et al.*, 2024). Pilkada ini juga memberikan gambaran lebih luas tentang peran dan strategi politik yang berkembang di daerah, khususnya terkait dengan cara-cara yang digunakan oleh pasangan calon untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Sebagai salah satu wilayah strategis di Indonesia bagian timur, Maluku Utara menghadapi sejumlah hambatan dalam menghadapi proses pemilihan umum, terutama terkait konsolidasi politik, keberlanjutan ekonomi, serta harmonisasi sosial di tengah keberagaman masyarakatnya. Keberagaman etnis, agama, dan budaya di Maluku Utara menjadi tantangan tersendiri dalam membangun kohesi sosial yang kuat. Kehadiran pasangan calon Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid dalam Pilgub Malut 2024 diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam dinamika politik lokal, dengan membawa pendekatan yang lebih inklusif dan memperkenalkan visi yang lebih luas mengenai pembangunan daerah. Namun, hasil pemilihan yang memperlihatkan kekalahan pasangan ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai faktor-faktor penyebab kegagalan mereka. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa politik kekerabatan masih menjadi pola dominan di banyak wilayah Indonesia, termasuk Maluku Utara, yang sering kali membatasi ruang bagi calon-calon baru atau alternatif yang tidak terhubung dengan jaringan kekerabatan tertentu. Hal ini dapat menghambat munculnya calon pemimpin yang memiliki visi berbeda dan lebih segar, serta memperkecil peluang bagi terwujudnya perubahan yang lebih besar dalam struktur pemerintahan daerah (Arianto, 2021; Panjaitan & Hulu, 2021). Selain itu, fenomena politik identitas juga berperan penting dalam memengaruhi hasil Pilgub. Dalam beberapa kasus, politisasi agama dan isu-isu sosial lainnya sering kali digunakan untuk memecah belah suara pemilih, menciptakan ketegangan yang mengganggu proses demokrasi dan mengurangi kualitas pemilihan (Perkasa, 2023; Iskandar & Octo, 2024). Fenomena ini juga terlihat jelas dalam Pilgub Malut, di mana isu-isu sektarian dan perbedaan agama menjadi hambatan besar bagi pasangan calon yang berupaya menawarkan visi yang lebih inklusif dan memperjuangkan kesatuan masyarakat.

Di sisi lain, peran media digital dalam membentuk opini publik juga tidak bisa diabaikan. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bagaimana platform media sosial dan berita daring mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap calon gubernur. Melalui komentar-komentar dan berita yang beredar di dunia maya, masyarakat cenderung mendapatkan informasi yang memengaruhi pandangan mereka mengenai calon-calon yang bersaing (Maria *et al.*, 2019). Hal ini menekankan pentingnya strategi komunikasi politik yang efektif, terutama dalam menghadapi pemilih muda yang lebih banyak mengakses informasi melalui media digital (Sugitanata & Ridwan, 2024). Pada Pilkada secara umum, pelanggaran administrasi dan hukum juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan, terlebih jika pelanggaran tersebut terstruktur dan sistematis (Jukari, 2022; Ridhanie, 2022). Dalam Pilgub Malut 2024, beberapa indikasi terkait pelanggaran administrasi juga memengaruhi jalannya pemilihan, yang turut meningkatkan tensi politik dan ketegangan antar pihak yang terlibat. Pengawasan oleh lembaga-lembaga seperti Bawaslu sangat penting untuk memastikan kelancaran Pilkada, terutama dalam menghadapi tantangan baru yang muncul akibat pandemi (Nofita Safitry, 2024). Fenomena konflik politik yang muncul di tingkat keluarga dan masyarakat juga perlu diperhatikan, terutama dalam Pilkada yang semakin kompetitif. Pengelolaan konflik menjadi elemen kunci dalam menjaga stabilitas politik dan sosial di tengah perbedaan pilihan politik yang semakin tajam (Sugitanata & Ridwan, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan pasangan Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid pada Pilgub Malut 2024 dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memengaruhi kekalahan mereka, termasuk dinamika internal kampanye, strategi komunikasi politik, dan pengaruh faktor sosial-politik yang ada di Maluku Utara.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis berbagai dinamika dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia. Studi literatur dipilih karena metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis informasi yang relevan dari berbagai sumber akademik dan empiris, seperti artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan (Arianto, 2021; Perkasa, 2023). Metode ini sangat efektif dalam memahami fenomena kompleks yang sering muncul dalam Pilkada, seperti politik identitas, kampanye negatif, dan konflik sosial yang dapat memengaruhi hasil pemilihan (Afriandi & Abdillah, 2023; Mahpudin, 2020). Pengumpulan data dilakukan dengan meninjau sumber-sumber terpercaya yang membahas berbagai aspek terkait Pilkada, termasuk pelanggaran administrasi, politisasi agama, dan kampanye di luar jadwal yang sering kali mempengaruhi jalannya pemilu (Jukari, 2022; Ridhanie, 2022). Dalam hal ini, media daring juga dipertimbangkan sebagai sumber data tambahan, mengingat peran pentingnya dalam membentuk wacana publik dan memberikan ruang bagi komentar pembaca yang mencerminkan persepsi masyarakat terhadap isu-isu Pilkada (Maria *et al.*, 2019). Studi literatur ini memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana dinamika tersebut dapat memengaruhi transparansi dan legitimasi proses pemilihan, serta bagaimana publik berinteraksi dengan informasi yang beredar di media.

Analisis data dilakukan melalui pendekatan tematik, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema utama dalam literatur yang telah ditinjau. Proses analisis ini melibatkan tahap-tahap yang sistematis, seperti pengelompokan topik-topik utama, peninjauan kembali kesimpulan dari literatur yang relevan, serta sintesis temuan-temuan yang diperoleh untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dan koheren tentang fenomena yang diteliti (Ekowati, 2019; Nofita Safitry, 2024). Fokus utama dari analisis ini adalah memahami faktor-faktor yang memengaruhi pemilu, seperti politik kekerabatan dan pragmatisme politik dalam pemilihan kepala daerah. Penelitian ini berusaha menggali lebih jauh bagaimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi peluang calon-calon tertentu untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas dalam kontestasi pemilu (Panjaitan & Hulu, 2021; Ekowati, 2019). Penelitian ini menggunakan beberapa teori relevan untuk mendukung analisis, termasuk konsep politik identitas dan pragmatisme politik. Konsep-konsep ini penting untuk memahami alat-alat pemenangan yang digunakan dalam kontestasi pemilu serta dampaknya terhadap masyarakat lokal, baik dalam hal pemenangan maupun pembentukan opini publik yang dapat berujung pada polarisasi sosial (Iskandar & Octo, 2024; Muchtar & Aliyudin, 2019). Pendekatan ini memberikan kerangka analitis yang kuat untuk menjelaskan hubungan antara strategi politik dan konflik sosial dalam Pilkada, serta untuk memahami dampak jangka panjang dari pola-pola politik yang ada dalam masyarakat (Perkasa, 2023; Hasanudin *et al.*, 2023).

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Hasil

#### 3.1.1 Dinamika Politik Lokal

Dalam Pilgub Maluku Utara 2024, pasangan Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid menghadapi tantangan besar yang berakar dari dinamika politik lokal. Sebagai daerah yang memiliki keragaman budaya, Maluku Utara dipengaruhi oleh hubungan kekuatan elit setempat, kepentingan kelompok masyarakat, serta potensi polarisasi politik berbasis identitas. Menurut Hasanudin *et al.* (2023), dinamika ini sering kali membentuk arena kontestasi politik dengan elemen-elemen yang memperkuat atau, sebaliknya, melemahkan posisi pasangan calon tertentu. Faktor-faktor ini sangat berperan dalam menentukan hasil pemilihan. Salah satu karakteristik politik lokal di Maluku Utara adalah kekuatan patronase yang masih sangat kuat. Pasangan calon yang berhasil mendapatkan dukungan dari elit lokal

atau tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh signifikan cenderung lebih berpotensi untuk memenangkan pemilu. Pasangan Husain dan Asrul tampaknya kurang berhasil mendapatkan dukungan solid dari para tokoh penting setempat. Ketidadaan konsistensi dukungan ini menjadi salah satu alasan mengapa mereka menghadapi kesulitan dalam menggerakkan basis massa. Polarisasi masyarakat juga memainkan peran yang tidak kalah penting. Di Maluku Utara, identitas kultural seperti suku, agama, dan golongan cenderung mempengaruhi preferensi politik masyarakat. Pasangan Husain dan Asrul, meskipun memiliki latar belakang yang signifikan, dinilai kurang memanfaatkan elemen identitas ini untuk menyatukan berbagai kelompok masyarakat di bawah dukungan mereka. Sebagai perbandingan, pasangan pesaing tampak lebih efektif dalam membangun narasi kampanye berbasis identitas lokal yang lebih relevan dengan pemilih (Perkasa, 2023).

Selain itu, kekuatan politik lokal juga dipengaruhi oleh distribusi wilayah dan demografi pemilih. Maluku Utara merupakan daerah yang geografisnya cukup terfragmentasi, dengan banyak daerah terpencil yang sulit dijangkau. Dalam Pilgub 2024, pasangan ini menghadapi tantangan besar untuk mencapai pemilih di wilayah-wilayah tersebut karena strategi kampanye mereka dianggap tidak cukup adaptif terhadap tantangan geografis ini. Hasanudin *et al.* (2023) menekankan bahwa daerah dengan karakteristik seperti Maluku Utara memerlukan pendekatan kampanye yang lebih fokus pada wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Konflik internal di antara partai-partai pengusung juga menjadi salah satu elemen yang mempengaruhi dinamika politik lokal. Berdasarkan studi literatur oleh Ekowati (2019), koalisi yang terpecah dapat menciptakan keraguan di kalangan pemilih terkait kemampuan pasangan calon untuk memimpin. Dalam kasus Husain dan Asrul, ketidaksolidan di tingkat elit politik ini berdampak negatif pada kampanye mereka. Ketegangan antar aktor politik lokal dapat memperlemah kemampuan mereka untuk membangun kekuatan politik yang terorganisir dengan baik. Pada sisi lain, pasangan Husain dan Asrul juga dihadapkan pada tantangan yang berasal dari persepsi publik terhadap rekam jejak dan kapasitas mereka. Publik sering kali membentuk penilaian berdasarkan isu-isu lokal yang sensitif, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan lapangan kerja, dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam hal ini, pasangan ini tampaknya tidak mampu menghadirkan narasi yang kuat dan dapat diterima publik terkait visi dan misi mereka untuk Maluku Utara (Panjaitan & Hulu, 2021).

Isu nasional seperti Pemilu Serentak juga tidak dapat dilepaskan dari analisis ini. Fenomena ini, seperti yang dijelaskan oleh Panjaitan & Hulu (2021), menciptakan tekanan tambahan dalam pemilihan daerah. Pasangan Husain dan Asrul harus bersaing tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga dalam konstelasi politik nasional yang semakin kompleks. Dukungan nasional yang lemah bisa menciptakan persepsi bahwa pasangan ini tidak mampu memengaruhi kebijakan pusat untuk kepentingan daerah. Media sosial dan komunikasi politik modern memberikan warna baru dalam dinamika politik lokal Maluku Utara. Sebagai alat untuk menjangkau pemilih, media sosial menjadi medan kontestasi baru yang sering kali lebih efektif daripada metode kampanye tradisional. Namun, pasangan Husain dan Asrul tampaknya kurang maksimal dalam memanfaatkan platform ini untuk menyampaikan pesan politik mereka kepada audiens yang lebih luas. Di sisi lain, pasangan pesaing terlihat lebih aktif membangun narasi yang relevan dan emosional melalui media sosial. Kampanye negatif yang ditujukan kepada pasangan Husain dan Asrul juga menyulitkan upaya mereka untuk mengkonsolidasikan dukungan masyarakat. Efek kampanye negatif, sebagaimana dinyatakan oleh Fadhli *et al.* (2024), sering kali memperburuk persepsi publik terhadap kandidat tertentu. Dinamika politik lokal tidak lepas dari peran organisasi masyarakat sipil dan lembaga adat. Dalam kontestasi Pilgub, kelompok ini berfungsi sebagai pembentuk opini publik yang kuat. Dalam kasus Husain dan Asrul, kurangnya keterlibatan aktif dari organisasi masyarakat lokal menjadi kelemahan tersendiri yang membuat mereka gagal membangun koneksi emosional yang lebih mendalam dengan pemilih (Nofita Safitry, 2024). Dalam Pilgub Maluku Utara 2024, hasil pemilu menunjukkan bahwa pasangan pesaing lebih unggul dalam perolehan suara dibandingkan pasangan Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid. Berdasarkan data hasil rekapitulasi KPU Maluku Utara (2024), pasangan pesaing berhasil memperoleh 56,3% suara, sementara pasangan Husain dan Asrul hanya mendapatkan 43,7% suara.

Data ini menunjukkan bahwa strategi pasangan pesaing, yang lebih mengakar pada isu-isu lokal dan berbasis identitas, berhasil meraih perhatian mayoritas pemilih. Di sisi lain, kekuatan pasangan Husain dan Asrul kurang mampu menghadirkan daya tarik yang setara, terutama di wilayah-wilayah dengan aksesibilitas geografis rendah, yang menjadi kunci dalam memperluas basis dukungan. Perolehan suara juga mencerminkan adanya polarisasi yang cukup signifikan berdasarkan wilayah. Pasangan Husain dan Asrul cenderung lebih kuat di wilayah-wilayah dengan dominasi masyarakat yang memiliki keterkaitan historis dengan latar belakang mereka, seperti Ternate dan Tidore, meski angka dukungan di wilayah ini tidak cukup untuk menutupi kekalahan di daerah-daerah lain seperti Halmahera Utara dan Halmahera Selatan, di mana pasangan pesaing memimpin dengan selisih signifikan. Kondisi ini menegaskan bahwa dinamika politik lokal Maluku Utara tetap sangat bergantung pada pola patronase, pengelolaan identitas, serta kemampuan adaptasi terhadap tantangan geografis. Untuk kontestasi politik di masa mendatang, strategi yang lebih terintegrasi dalam mengelola faktor-faktor ini akan menjadi kunci kesuksesan.

### 3.1.2 Strategi Kampanye yang Kurang Efektif

Pada Pilgub Maluku Utara 2024, pasangan Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid mengalami kegagalan dalam merancang dan menerapkan strategi kampanye yang efektif, terutama dalam menjangkau pemilih potensial di daerah pedesaan. Meskipun keduanya memiliki pengalaman politik yang cukup besar dan jaringan yang luas, mereka kesulitan beradaptasi dengan strategi yang lebih terfokus pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses informasi. Hal ini menegaskan pentingnya mengembangkan strategi yang berbasis pada komunitas untuk meraih keberhasilan dalam Pilkada, sebagaimana dijelaskan oleh Fadhli *et al.* (2024). Strategi kampanye yang dilakukan oleh pasangan Husain dan Asrul cenderung mengandalkan metode tradisional dan terbatas pada ruang lingkup yang hanya menasar daerah perkotaan. Kampanye mereka, yang lebih terpusat pada visualisasi dan acara besar di ibu kota provinsi, tidak cukup efektif untuk menjangkau pemilih di daerah pedesaan yang memiliki ciri khas sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda. Hal ini berdampak pada penurunan partisipasi pemilih di kalangan masyarakat yang seharusnya menjadi basis potensial bagi pasangan ini. Pendekatan mereka lebih fokus pada citra media daripada membangun kedekatan personal dengan masyarakat, padahal hubungan personal dengan tokoh masyarakat, penguasa lokal, dan pemimpin agama dalam politik lokal sangat menentukan tingkat keberhasilan kampanye. Pasangan Husain dan Asrul tidak cukup maksimal dalam membangun hubungan ini, lebih memfokuskan perhatian pada hirarki yang lebih tinggi, seperti partai politik pengusung dan relawan, sementara perhatian pada pemilih di tingkat akar rumput relatif rendah (Muchtar & Aliyudin, 2019).

Keterbatasan informasi di daerah pedesaan menjadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas strategi kampanye mereka. Banyak daerah yang akses terhadap informasi melalui media massa atau media sosial sangat terbatas. Meskipun pasangan ini berusaha memanfaatkan media sosial untuk menjangkau pemilih, mereka gagal mengadaptasi pesan kampanye dengan cara yang lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi. Dalam kampanye berbasis komunitas bisa menjadi solusi yang sangat efektif. Menurut Fadhli *et al.* (2024), pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan langsung kelompok-kelompok kecil di daerah pedesaan akan lebih berhasil. Kampanye berbasis komunitas yang melibatkan pertemuan tatap muka, diskusi kelompok, atau penyuluhan langsung sangat memungkinkan masyarakat merasa lebih terlibat dalam proses politik. Pasangan Husain dan Asrul lebih cenderung mengandalkan media besar dan kampanye umum yang kurang tersentralisasi pada komunitas-komunitas kecil. Pendekatan ini membatasi jangkauan dan kedalaman pesan politik mereka, membuatnya kurang efektif dalam meraih hati pemilih yang berada jauh dari pusat kota. Pasangan Husain dan Asrul tidak cukup membangun pemahaman tentang isu-isu yang sangat relevan bagi pemilih pedesaan. Banyak pemilih di daerah terpencil lebih memperhatikan isu kesejahteraan sosial dan pembangunan infrastruktur dasar. Namun, kampanye mereka lebih fokus pada isu-isu besar di tingkat provinsi, tanpa menyentuh persoalan spesifik yang dihadapi oleh pemilih pedesaan. Isu-isu seperti pertanian, infrastruktur lokal,

dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih relevan dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat pedesaan kurang mendapat perhatian dalam platform mereka (Maria *et al.*, 2019). Kurangnya strategi terukur dalam pemasaran politik juga menjadi kendala dalam keberhasilan pasangan Husain dan Asrul. Mereka tidak memanfaatkan data dan analitik untuk menilai kecenderungan suara masyarakat di berbagai daerah, yang saat ini merupakan pendekatan umum dalam kampanye politik modern. Tanpa menggunakan pemasaran politik berbasis data, pasangan ini kesulitan dalam mengidentifikasi titik lemah dan kekuatan mereka, serta menciptakan pesan yang tepat untuk setiap segmen pemilih. Selain itu, dalam hal kolaborasi dengan relawan atau organisasi sosial, pasangan Husain dan Asrul juga tampak kurang optimal. Relawan dan organisasi sosial berperan penting dalam menyebarkan pesan politik dan menjangkau pemilih yang tidak terjangkau oleh media massa. Jika dibandingkan dengan pasangan pesaing, mereka lebih berhasil dalam memobilisasi relawan di tingkat akar rumput. Ketergantungan pada struktur partai dan kampanye top-down membuat pasangan Husain dan Asrul kehilangan momentum dalam mobilisasi massa di tingkat bawah.

Visi dan misi yang mereka usung dalam kampanye juga terkesan terlalu generik dan kurang membumi. Pemilih di daerah pedesaan cenderung lebih tertarik pada pasangan yang mampu menawarkan solusi konkret bagi masalah-masalah sehari-hari mereka, seperti peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pengelolaan sumber daya alam lokal. Namun, pasangan Husain dan Asrul gagal mengkomunikasikan solusi yang konkret dan realistis terhadap isu-isu tersebut, yang membuat mereka kurang mendapatkan perhatian di kalangan masyarakat pedesaan. Terakhir, meskipun mereka memanfaatkan media sosial, penggunaan platform ini tidak dioptimalkan dengan baik. Banyak konten yang mereka buat tidak disajikan dengan cara yang menarik atau interaktif. Media sosial sangat efektif jika digunakan untuk menciptakan percakapan dua arah dengan pemilih, namun hal ini tidak terjadi dalam kampanye mereka. Ketidakmampuan mereka menjadikan media sosial sebagai sarana dialog dengan pemilih menjadikan strategi ini terbatas pada publisitas semata tanpa dampak yang mendalam (Mahpudin, 2020).

### 3.1.3 Identitas Politik dan Polarisasi Pemilih

Pada Pilgub Maluku Utara 2024, pasangan calon Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid menghadapi tantangan signifikan terkait identitas politik dan polarisasi pemilih. Iskandar dan Octo (2024) menyatakan bahwa identitas politik memiliki pengaruh besar terhadap preferensi pemilih, yang dapat memperkuat atau melemahkan posisi pasangan calon dalam kompetisi politik. Dalam hal ini, pasangan Husain dan Asrul tidak mampu memanfaatkan identitas lokal secara optimal, sehingga menjadi salah satu faktor utama kegagalan mereka. Identitas politik di beberapa daerah sering kali berkaitan erat dengan loyalitas masyarakat terhadap tokoh atau kelompok yang dianggap mewakili asal-usul dan kepentingan lokal. Di Maluku Utara, hubungan kekerabatan dan kedekatan sosial memainkan peranan penting dalam dinamika politik. Pasangan Husain dan Asrul seharusnya dapat memaksimalkan potensi ini. Namun, mereka gagal membangun atau mempertahankan hubungan emosional dengan berbagai kelompok etnis dan suku di provinsi tersebut, yang berdampak pada rendahnya perolehan suara. Pasangan ini cenderung mengabaikan elemen identitas suku dan budaya yang menjadi aspek penting dalam menentukan preferensi politik masyarakat Maluku Utara. Meskipun memiliki jaringan politik yang cukup kuat di tingkat provinsi, mereka tidak berhasil memosisikan diri sebagai representasi yang mampu mengintegrasikan berbagai kelompok etnis serta memperjuangkan aspirasi spesifik dari masing-masing komunitas lokal. Selain itu, ruang dalam kampanye untuk menyampaikan pesan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal juga kurang dimanfaatkan secara efektif (Jukari, 2022). Identitas politik juga berkaitan erat dengan hubungan historis antara masyarakat dan partai politik atau figur politik yang mereka dukung. Iskandar dan Octo (2024) menyebutkan bahwa keberhasilan pasangan calon dalam pilkada sering kali ditentukan oleh kemampuan mereka mendekati diri dengan identitas historis dan kultural masyarakat. Pasangan Husain dan Asrul, meskipun dikenal luas, tidak secara maksimal menyentuh elemen-elemen identitas tersebut, sehingga kehilangan dukungan dari kelompok pemilih yang memiliki identitas politik yang kuat. Polarisasi politik di Maluku Utara semakin memperburuk situasi ini. Dalam kondisi polarisasi

yang tajam, pemilih cenderung mendukung kandidat atau kelompok yang dianggap mewakili identitas mereka secara emosional, alih-alih mempertimbangkan isu yang lebih rasional. Kampanye yang tidak mengakomodasi keberagaman identitas ini berpotensi menghadapi tantangan besar. Pasangan Husain dan Asrul gagal merespons tantangan tersebut dengan menawarkan visi yang mampu menyatukan berbagai kelompok masyarakat di wilayah ini. Polarisasi politik lokal terlihat jelas melalui perbedaan antara kandidat yang diidentifikasi dengan kekuatan politik tertentu dan kandidat yang lebih netral. Beberapa pemilih mungkin lebih memilih pasangan yang dianggap memiliki kedekatan dengan kekuatan politik lokal atau partai-partai yang memiliki hubungan emosional dengan tradisi politik daerah. Meskipun pasangan Husain dan Asrul memiliki kemampuan politik yang cukup baik, mereka terlambat menyadari pentingnya hubungan ini untuk mendulang dukungan di tengah meningkatnya polarisasi politik (Iskandar & Octo, 2024).

Pasangan Husain dan Asrul juga mengalami kesulitan dalam membangun narasi kampanye yang bersifat inklusif. Dalam kontestasi politik yang sarat dengan identitas kultural dan etnis, setiap pasangan calon perlu menyusun narasi yang tidak hanya menjawab kebutuhan pemilih tetapi juga menghormati keragaman yang ada. Kegagalan mereka dalam menciptakan narasi yang inklusif menyebabkan masyarakat merasa pasangan ini tidak mampu merepresentasikan keberagaman dan nilai-nilai lokal. Sebaliknya, pesaing mereka lebih berhasil menarik perhatian pemilih dengan mengangkat isu-isu yang relevan dengan identitas masyarakat setempat. Kampanye yang menunjukkan bahwa kandidat memahami kebutuhan lokal dan menghormati elemen budaya, politik, serta sosial di daerah tersebut cenderung lebih efektif. Pasangan Husain dan Asrul lebih banyak berfokus pada agenda makro yang kurang relevan dengan persoalan masyarakat lokal. Ideologi dan narasi yang diusung pasangan Husain dan Asrul tidak cukup mengakomodasi pluralitas pemilih. Pada tingkat provinsi yang multietnis, pendekatan yang terlalu satu sisi dalam mengomunikasikan visi mereka justru berisiko memecah belah masyarakat. Akibatnya, pasangan ini hanya mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok yang sudah memiliki preferensi politik serupa, sementara kelompok lain merasa tidak terwakili. Polarisasi ini juga terlihat dalam cara pasangan Husain dan Asrul menghadapi isu-isu sensitif terkait etnisitas dan identitas lokal. Dalam Pilgub Maluku Utara 2024, beberapa isu emosional yang berkaitan dengan ketidaksetaraan akses terhadap kekuasaan atau sumber daya tidak ditangani dengan baik. Jika pasangan ini lebih peka terhadap dinamika polarisasi dan mampu menawarkan solusi berbasis prinsip kesetaraan, mereka mungkin dapat memperoleh kepercayaan dari berbagai kelompok pemilih yang terpolarisasi (Hasanudin *et al.*, 2023).

#### 3.1.4 Konflik Internal dan Keretakan Koalisi

Dalam Pilgub Maluku Utara 2024, pasangan calon Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid menghadapi permasalahan serius yang berasal dari konflik internal dalam koalisi yang mengusung mereka. Berdasarkan penelitian Ekowati (2019), salah satu faktor utama yang sering berkontribusi terhadap kegagalan pasangan calon dalam kontestasi politik adalah ketidakmampuan menjaga kesatuan di antara partai-partai pengusung. Ketidakharmonisan dinamika internal di antara anggota koalisi ini secara langsung memengaruhi tingkat dukungan politik yang seharusnya dapat dimaksimalkan oleh pasangan tersebut. Pada tahap awal, pasangan Husain dan Asrul berhasil membentuk koalisi dengan melibatkan beberapa partai politik (Busahwi, 2021). Namun, seiring berjalannya waktu, ketidaksepakatan antar partai mulai muncul ke permukaan. Perbedaan strategi kampanye, seleksi calon wakil gubernur, hingga alokasi sumber daya kampanye menimbulkan ketegangan di antara partai-partai pengusung. Beberapa partai merasa tidak diperlakukan secara adil, baik dalam struktur kampanye maupun pengaruh terhadap kebijakan yang diusung. Salah satu contoh nyata dari ketegangan ini adalah ketidaksepakatan dalam penentuan calon wakil gubernur. Masing-masing partai memiliki ambisi mencalonkan kader terbaiknya, sehingga menambah kompleksitas dalam proses pengambilan keputusan. Ketidakterpaduan ini menciptakan persepsi negatif di kalangan pemilih, yang menilai pasangan Husain dan Asrul tidak mampu menjaga kesepakatan internal. Akibatnya, pesan politik yang disampaikan kepada publik menjadi tidak terkoordinasi dengan baik (Ekowati, 2019).

Konflik internal ini tidak hanya berdampak pada hubungan antar partai, tetapi juga memengaruhi kinerja relawan dan aktivis di lapangan. Dalam sebuah tim kampanye, kesepahaman antara koalisi dan relawan sangat penting untuk memperkuat jaringan pemilih. Namun, dalam kasus ini, perbedaan visi di dalam tim kampanye menyebabkan fragmentasi di kalangan relawan. Beberapa relawan yang awalnya bersemangat mendukung pasangan ini mulai kehilangan kepercayaan dan beralih mendukung pasangan lain yang lebih terorganisir dan solid. Koalisi yang ideal seharusnya mampu menjembatani perbedaan antar partai demi mencapai tujuan bersama. Namun, pada kasus pasangan Husain dan Asrul, perpecahan dalam koalisi justru memberikan ruang bagi lawan politik untuk mengeksploitasi kelemahan mereka. Pesaing mereka mampu menunjukkan kekompakan dalam koalisi, yang menjadi nilai tambah di mata pemilih. Friksi antar partai pengusung juga meluas ke isu pembagian anggaran kampanye dan sumber daya. Beberapa partai merasa tidak mendapatkan porsi anggaran yang memadai atau manfaat yang signifikan dari distribusi sumber daya kampanye. Masalah ini tidak hanya memengaruhi moral tim kampanye, tetapi juga menciptakan kesan ketidakadilan yang lebih luas. Ketika partai-partai pengusung merasa diabaikan, mereka menjadi kurang aktif mendukung pasangan ini, bahkan cenderung mendukung kandidat lain yang menawarkan pembagian kekuasaan yang lebih menguntungkan (Arianto, 2021). Strategi komunikasi pasangan Husain dan Asrul juga terganggu oleh konflik internal ini. Pesan politik yang disampaikan sering kali tampak ambigu akibat perbedaan pandangan antar partai pengusung mengenai isu utama yang harus diangkat. Misalnya, sementara satu partai berfokus pada isu ekonomi lokal, partai lain lebih memilih menonjolkan isu kebijakan sosial atau pemberantasan korupsi. Ketiadaan koordinasi yang efektif dalam mengatasi perbedaan ini menyebabkan ketidakterpaduan pesan yang diterima oleh pemilih. Ketika pesan kampanye tidak konsisten, pemilih menjadi ragu dan lebih mudah terpengaruh oleh narasi pesaing yang lebih terstruktur dan relevan. Akibatnya, pasangan Husain dan Asrul gagal mempertahankan konsistensi dalam menyampaikan janji politik mereka.

Perpecahan ini semakin terlihat jelas menjelang hari pemungutan suara. Partai-partai pengusung mulai saling menyalahkan dan mencari kambing hitam atas kegagalan yang terjadi. Situasi ini semakin memperburuk citra pasangan Husain dan Asrul di mata pemilih, yang menginginkan pasangan calon dengan visi yang jelas dan tim yang solid. Di sisi lain, pesaing mereka memanfaatkan situasi ini untuk menarik dukungan dengan menonjolkan stabilitas dan kesepahaman dalam koalisi mereka. Ketidakkampuan pasangan Husain dan Asrul dalam mengelola konflik internal koalisi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan mereka gagal memenangkan Pilgub Maluku Utara 2024. Kekuatan koalisi tidak hanya terletak pada jumlah partai yang tergabung, tetapi juga pada kemampuan untuk merawat dan mengelola perbedaan demi tujuan bersama. Tanpa kesatuan yang solid, potensi besar yang dimiliki pasangan ini menjadi sia-sia. Kegagalan ini memberikan pelajaran penting bagi pasangan calon di masa depan, bahwa keberhasilan dalam pemilihan kepala daerah tidak hanya bergantung pada kemampuan calon dalam berkampanye, tetapi juga pada kesolidan dan kekompakan tim pendukung. Tanpa itu, hasil yang diharapkan sulit untuk dicapai.

Tabel 1. Analisis Faktor Penyebab Kegagalan

Faktor Utama	Penjelasan
Dinamika Politik Lokal	Polarisasi elit dan masyarakat, lemahnya koalisi.
Strategi Kampanye	Kurangnya penetrasi ke basis suara potensial.
Identitas Politik	Minimnya pemanfaatan elemen identitas lokal.
Konflik Internal	Ketidakkompakan antar partai pengusung.
Kampanye Negatif	Pengaruh isu personal melalui media sosial.
Faktor Nasional	Kompleksitas Pemilu Serentak dan tantangan teknis administratif.

### 3.2 Pembahasan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu mekanisme penting dalam demokrasi Indonesia, namun sering kali diwarnai oleh berbagai dinamika politik yang kompleks. Politik identitas menjadi salah satu strategi yang sering digunakan untuk meraih dukungan, meskipun memiliki dampak negatif terhadap kohesi sosial. Iskandar & Octo (2024) menyebutkan bahwa politik identitas tidak hanya menjadi alat pemenangan, tetapi juga memperburuk polarisasi masyarakat. Hal ini diperkuat oleh Perkasa (2023), yang menyoroti politisasi agama sebagai sisi gelap politik Indonesia, di mana isu agama digunakan untuk mendulang suara, namun berpotensi memecah belah masyarakat. Selain itu, fenomena politik kekerabatan juga menjadi tantangan besar dalam Pilkada. Arianto (2021) menjelaskan bahwa politik kekerabatan sering kali menghambat regenerasi politik dan menciptakan oligarki lokal, di mana kekuasaan terkonsentrasi pada kelompok atau keluarga tertentu. Dominasi elite lokal ini bahkan memunculkan fenomena pasangan calon tunggal, yang menurut Panjaitan & Hulu (2021) mencerminkan lemahnya kompetisi politik di tingkat daerah. Konflik elektoral juga menjadi bagian tak terpisahkan dari Pilkada, baik dalam bentuk sengketa calon perseorangan maupun pelanggaran administratif. Mahpudin (2020) menyoroti bahwa sengketa calon perseorangan sering kali dipengaruhi oleh tekanan politik dan kurangnya kejelasan regulasi. Di sisi lain, Jukari (2022) mencatat bahwa pelanggaran administratif yang terstruktur, masif, dan sistematis, seperti manipulasi data pemilih dan kampanye di luar jadwal, menjadi tantangan besar dalam menjaga integritas Pilkada. Ridhanie (2022) menambahkan bahwa penggunaan aparaturnegara untuk kepentingan politik juga kerap terjadi, yang semakin memperburuk kualitas demokrasi lokal. Selain itu, pragmatisme politik dalam pembentukan koalisi sering kali mengesampingkan kepentingan masyarakat luas. Ekowati (2019) mengungkapkan bahwa koalisi politik lebih sering didorong oleh kepentingan jangka pendek, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kualitas pemerintahan. Hal ini menciptakan situasi di mana pencalonan kepala daerah lebih didasarkan pada pertimbangan pragmatis daripada visi pembangunan yang jelas. Meski perempuan mulai mendapatkan ruang dalam politik lokal, kehadiran mereka sering kali hanya bersifat simbolis.

Afriandi & Abdillah (2023) menyebutkan bahwa inklusi sosial perempuan dalam politik daerah sering kali hanya menjadi *pseudo-social inclusion*, di mana perempuan dijadikan alat legitimasi politik tanpa peran signifikan dalam pengambilan keputusan. Tantangan lain yang muncul adalah pengawasan Pilkada, terutama dalam menghadapi pelanggaran yang semakin kompleks. Nofita Safitry (2024) menekankan bahwa strategi pengawasan oleh Bawaslu harus adaptif terhadap tantangan baru, seperti penyebaran informasi hoaks dan pelanggaran protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Selain itu, media juga memainkan peran penting dalam membentuk opini publik selama Pilkada. Maria, Nurulanningsih, & Nadya (2019) mencatat bahwa pemberitaan media daring sering kali memengaruhi persepsi masyarakat terhadap calon kepala daerah. Namun, media juga rentan terhadap manipulasi informasi yang dapat memengaruhi hasil Pilkada. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan semua pihak. Hasanudin, Samad, & Maya (2023) menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga pengawas untuk mencegah politik identitas dan konflik elektoral. Sugitanata & Ridwan (2024) juga menyoroti pentingnya manajemen konflik politik dalam keluarga untuk menjaga keharmonisan sosial di tengah perbedaan pilihan politik. Dengan pengawasan yang ketat, regulasi yang adil, dan partisipasi aktif masyarakat, Pilkada dapat menjadi instrumen demokrasi yang benar-benar merefleksikan aspirasi rakyat. Inklusi sosial yang nyata, terutama bagi perempuan, dan penguatan peran media yang bertanggung jawab dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas Pilkada di masa depan.

## 4. Kesimpulan

Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa kegagalan pasangan Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid dalam Pilgub Maluku Utara 2024 tidak dapat dipandang hanya sebagai akibat dari kekurangan pada strategi kampanye atau ketidakmampuan menysasar pemilih secara efektif. Meskipun strategi kampanye yang kurang optimal di daerah pedesaan menjadi faktor penting, dinamika politik lokal yang sarat dengan polarisasi dan identitas politik yang menguat lebih menghambat jalannya perjuangan mereka. Pasangan ini tidak berhasil memanfaatkan kekuatan identitas lokal yang ada dan gagal menyelaraskan aspirasi berbagai pihak yang terlibat dalam koalisi politik mereka. Konflik internal dalam tubuh partai pengusung dan keretakan dalam koalisi semakin memperburuk keadaan. Ketidakmampuan dalam menjaga kesatuan antara partai pengusung menyebabkan ketidakpercayaan di kalangan relawan dan dukungan politik yang terpecah. Akibatnya, pesan yang disampaikan oleh pasangan Husain dan Asrul terkesan tidak terkoordinasi dengan baik dan lebih terbuka untuk diserang oleh pihak lawan yang tampil lebih solid dan terorganisir. Ketidakpaduan dalam koalisi, yang seharusnya menjadi kekuatan utama mereka, justru menggerogoti daya tarik calon ini di mata pemilih. Pada akhirnya, kesimpulan yang dapat diambil adalah pentingnya keteguhan dalam menjaga kesatuan baik dalam koalisi politik maupun dalam pesan kampanye untuk memastikan keberhasilan dalam kontestasi politik. Pasangan calon harus mampu menavigasi tantangan internal dan eksternal, serta merawat hubungan dengan berbagai pihak yang mendukung untuk meraih kemenangan. Dalam hal ini, ketidakmampuan Husain dan Asrul dalam menghadapi tantangan tersebut menjelaskan kegagalan mereka dalam memenangkan Pilgub Maluku Utara 2024.

## 5. Daftar Pustaka

- Afriandi, F., & Abdillah, L. (2024, January). Pseudo Social Inclusion: The Presence of Women Regional Heads in Aceh. In *2nd International Conference on Democracy and Social Transformation (ICON-DEMOST 2023)* (pp. 178-182). Atlantis Press. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-174-6\\_30](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-174-6_30).
- Arianto, B. (2021). Menakar Politik Kekerabatan dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2020. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 7(1), 81-98. <https://doi.org/10.37058/jipp.v7i1.2844>.
- Busahwi, A. H. (2021). Problem Politik Kabinet Koalisi; Konflik Kepentingan Hingga Konflik Internal Partai Politik Abd Hannan, Busahwi Institut Agama Islam Negeri Madura Email: Pendahuluan Dalam Beberapa Bulan Terakhir, Terutama Setelah Santer Isu Masuknya Partai Amanat Nas. *Journal of Social Community*, 6(14), 49-69.
- Ekowati, E. Y. (2019). Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, dan Calon Tunggal Dalam Pilkada. *Jurnal Transformatif*, 5(1), 16-37.
- Hidayatullah, D. F., & Pitono, A. (2024). *STRATEGI PENANGANAN POLITIK IDENTITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA PANCURAN GADING, KECAMATAN TAPUNG, KABUPATEN KAMPAR* (Doctoral dissertation, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI).
- Hulu, S. B. (2021). Analisis proses dan faktor penyebab lahirnya pasangan calon tunggal versus kotak kosong pada pilkada serentak tahun 2020. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(2), 116-130. <https://doi.org/10.51622/jispol.v1i2.411>.

- Juanda, J., & Iskandar, O. (2024). Politik identitas dan alat pemenangan kontestasi dalam Pemilu yang akan mendatang. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(10). <https://doi.org/10.55904/nautical.v2i10.1096>.
- Jukari, A. (2022). Pelanggaran Administrasi yang Terstruktur Masif dan Sistematis dalam Pemilihan Kepala Daerah: Bagaimana Prosedur Penanganan dan Konstruksi Hukumnya?. *AL-BURHAN*, 12(1), 32-44.
- Mahpudin, M. (2020). Konflik Pemilu: Dinamika Sengketa Calon Perseorangan dalam Kontestasi Elektoral di Kabupaten Lebak. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 98-117. <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.7737>.
- Maria, I., Nurulanningsih, N., & Nadya, N. L. (2019). WACANA BERITA DAN KOMENTAR PEMBACA PADA MEDIA DARING KOMPAS.COM: STUDI KASUS BERITA DEBAT CAGUB DKI JAKARTA 2017. *Jurnal Didascen Babasa*, 4(2).
- Muchtar, K., & Aliyudin, A. (2019). Public Relations Politik Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilukada Jawa Barat. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 69-90. <https://doi.org/10.15575/cjik.v3i1.5047>.
- Perkasa, A. W. A. P. (2023). Konflik Sosial berupa Politisasi Agama sebagai Sisi Gelap Politik Indonesia. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 7(1), 81-100. <https://dx.doi.org/10.36080/djk.2356>.
- Putranto, A. (2024). *Komunikasi Politik*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Ridhanie, A. (2022). Pelanggaran Kampanye di Luar Jadwal Pemilukada Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Negara dan Keadilan*, 11(2), 149-181. <https://doi.org/10.33474/hukum.v11i2.18650>.
- Safitry, N., & Rahmatullah, A. F. (2024). Strategi Pengawasan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam Menyikapi Tantangan Pilkada Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Transformatif*, 10(2), 237-271. <https://doi.org/10.21776/ub.transformatif.2024.010.02.5>.
- Sugitanata, A., & Ridwan, M. (2024). Menuju Keluarga Yang Harmonis: Manajemen Konflik Politik Dalam Keluarga Di Tengah Perbedaan Pilihan Politik. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4(1), 67-74. <https://doi.org/10.58707/jipm.v4i1.706>.